



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jl.Merapi,beran,Sleman KAB. SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<http://pn-sleman.go.id>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,90 / 97,41%

Jumlah	109 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 73 PEREMPUAN : 36	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 14
	SMP : 1	S1 : 42
	SMU : 46	S2 : 6
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 6	SWASTA : 27
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 3
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 73	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,771 |
| 2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? | 3,798 |
| 3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) | 3,798 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Indikator Transparansi Biaya

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Dari hasil persepsi responden pada indikator Hadiah/ tanda terima kasih ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,771 masih dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sleman klas IA Sangat baik atau tidak pernah menerima maupun meminta tanda terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Namun secara angka merupakan bagian dari unsur yang terendah pertama sehingga tetap akan ditindaklanjuti dengan cara yaitu:

Dihimbau jangan sekali-kali menerima maupun meminta tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan kepada pengunjung layanan atau informasi sedangkan Terhadap pelayanan pada unsur biaya/tarif tetap berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Klas IA nomor: W13.U2/1781/HK.02/IV/2022 tentang Taksiran Panjar Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman, dan Biaya PNBP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

2. Indikator Hadiah/ tanda terima kasih

Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

Dari hasil persepsi responden pada indikator Hadiah/ tanda terima kasih ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,798 masih dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sleman klas IA Sangat baik atau tidak pernah menerima maupun meminta tanda terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Namun secara angka merupakan bagian dari unsur yang terendah pertama sehingga tetap akan ditindaklanjuti dengan cara yaitu:

Dihimbau jangan sekali-kali menerima maupun meminta tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan kepada pengunjung layanan atau informasi.

3. Indikator Transparansi pembayaran

Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Pembayaran ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,798 masih dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sleman klas IA Sangat baik dan bukti transaksi pembayaran sangat transparan. Namun secara angka merupakan bagian dari unsur yang terendah kedua sehingga tetap akan ditindaklanjuti dengan cara yaitu:

Transparansi pembayaran mutlak dilakukan dengan memberikan informasi serta disertai bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

20 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri